**BAB IV**

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

1. **Gambaran Umum Objek Penelitian**
2. **Profil Singkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Lokasi BPR biasanya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga BPR banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh indonesia. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Pengegertian BPR sesuai dengan UU tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan pada Undang-Undang perbankan No.10 Tahun 1998 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP). Ketentuan tersebut diberlakukan mengingat lembaga-lembahga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat indonesia serta masih diperlukan oleh masyarakat sehingga keberadaannya diakui. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 memberikan kejelasan status atas lembaga-lembaga tersebut. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan pada PP.

1. **Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

lembaga perkreditan rakyat didirikan berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk lepas dari jerat rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Lembaga perkreditan rakyat muncul pada abad ke-19, ditandai dengan terbentuknya beberapa lembaga seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa (Bank Pasar) pada zaman kolonial Belanda. Pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah mendorong pendirian bank-bank di pedesaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar seperti Bank Pasar Bank Karya Produksi (BKPD). Pada awal 1970-an, Pemerintah Daerah mulai membentuk Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LKPD). Pada 1998, melalui Keputusan Presiden RI No. 38, pemeritintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988) yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Bank-Bank pasar yang telah terbentuk dikukuhkan menjadi BPR berdasarkan pada Pakto 1988. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR. Sebagai langkah lanjutan Pakto 1988, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan dalam bidang perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, yaitu: penyempurnaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan penyempurnaan lebih lanjut yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia yang ditempuh dengan cara menyederhanakan jenis bank menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan, diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Pada tahap pelaksanaannya, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 didukung dengan peraturan pemerintahan No. 71 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut memungkinkan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank dan lembaga-lembaga keuangan kecil, seperti Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan lembaga keuangan lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 oktober 1997 dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang diterapkan dengan peraturan pemerintah. BPR yang didirikan sesudah Pakto 1988 ataupun Lembaga Keuangan yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP No. 71 Tahun 1992, tunduk pada ketentuan ketentuan yan diatur dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank.

1. **Profil Singkat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

UU No. 10 Tahun 1998 yang merubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenai status Perbankan Syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syairah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan SK Direksi BI No. 32/4/KPPB tanggal 19 Mei 1999 berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai fungsinya, BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sama seperti BPR Konvensional, BPRS  kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum, karena BPRS  dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

1. **Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)**

Status hukum BPR pertama kali dalam paket kebijakan Oktober (Pakto) tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagain dari paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannnya UU No.7 tahun 1992, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin Menteri Keuangan. Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Berdirinya BPRS tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Cikal bakal lahirnya bank syariah di Indonesia pertama kali dirintis dengan mendirikan tiga BPR Syariah yaitu:

1. PT. BPR Dana Mardhatillah, Kec, Margahayu, Bandung;

2. PT BPR Berkah Amal Sejahtera, Kec. Padalarang, Bandung;

3. PT BPR Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran, Bandung.

Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapatkan izin prinsip dari menteri keuangan RI. Selanjutnya, dengan bantuan asistensi teknis dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan. Pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI.

1. **Analisis Data**
2. **Gambaran Singkat Data Penelitian**

**Tabel 4.1**

**Deskriptif Statistik Tingkat Kolektibilitas Golongan Macet BPR dan BPRS**

**Periode 2014-2018**

**(Dalam Miliar Rupiah)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BPR | | BPRS | |
| Tahun | Jumlah tingkat kolektibilitas | Tahun | Jumlah tingkat kolektibilitas |
| 2014 | 20486 | 2014 | 2025 |
| 2015 | 25694 | 2015 | 2727 |
| 2016 | 32320 | 2016 | 3810 |
| 2017 | 39878 | 2017 | 4760 |
| 2018 | 29194 | 2018 | 4293 |
| Jumlah | 147572 | Jumlah | 17615 |
| Rata-rata | 2635 | Rata-rata | 321 |

Sumber: Laporan bulanan statistik Perbankan Indonesia OJK, diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, dapat dideskripsikan bahwa jumlah tingkat kolektibilitas golongan macet BPR sebesar Rp 147.572.000.000 dengan rata-rata sebesar Rp 2.635.000.000.000. Sedangkan jumlah tingkat kolektibilitas golongan macet BPRS sebesar Rp 17.615.000.000.000 dengan rata-rata sebesar Rp 321.000.000.000.

Selisih tingkat kolektabilitas = BPR - BPRS

= Rp 147.572.000.000.000 –

Rp 17.615.000.000.000

= Rp 129.957.000.000.000

Dari selisih tingkat kolektibilitas golongan macet antara BPR dengan BPRS sebesar Rp 129.957.000.000.000, dapat disimpulkan bahwa tingkat kolektibilitas BPRS lebih rendah dibandingakan dengan tingkat kolektibilitas BPR.

**Tabel 4.2**

**Tingkat Kolektibilitas BPR**

**Periode 2014-2018**

**(Dalam miliar rupiah)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan | Jumlah  (2014) | Jumlah  (2015) | Jumlah  (2016) | Jumlah  (2017) | Jumlah  (2018) |
| Januari | 1483 | 1842 | 2313 | 2983 | 3420 |
| Februari | 1531 | 1903 | 2407 | 3041 | 3488 |
| Maret | 1567 | 1949 | 2479 | 3128 | 3536 |
| April | 1616 | 2006 | 2540 | 3220 | 3586 |
| Mei | 1690 | 2095 | 2640 | 3269 | 3609 |
| Juni | 1698 | 2139 | 2656 | 3342 | 3791 |
| Juli | 1745 | 2205 | 2727 | 3392 | 3850 |
| Agustus | 1797 | 2238 | 2817 | 3528 | 3916 |
| September | 1819 | 2280 | 2863 | 3493 |  |
| Oktober | 1885 | 2372 | 2980 | 3579 |  |
| November | 1889 | 2415 | 3042 | 3562 |  |
| Desember | 1766 | 2250 | 2866 | 3341 |  |

Sumber: Laporan bulanan statistik perbankan indonesia OJK, diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kolektibilitas golongan macet BPR Tahun 2014-2018 meningkat di setiap bulan dan tahunnya. Pada tahun 2014 diketahui bahwa tingkat kolektibilitas BPR terendah terdapat pada bulan Januari dengan jumlah sebesar Rp 1.483.000.000.000, sedangkan tingkat kolektibilitas tertinggi sebesar Rp 1.889.000.000.000 yang terdapat pada bulan November. Pada tahun 2015 tingkat kolektibilitas BPR terjadi peningkatan dengan perolehan jumlah terendah sebesar Rp 1.842.000.000.000 di bulan Januari dan jumlah tertinggi terdapat pada bulan November dengan perolehan sebesar Rp.2.415.000.000.000. Pada tahun 2016 tingkat kolektibilitas BPR kembali meningkat dengan jumlah terendah diperoleh pada bulan Januari sebesar Rp 2.313.000.000.000, sedangkan jumlah tertinggi diperoleh pada bulan November sebesar Rp 3.042.000.000.000. Pada tahun 2017 tingkat kolektibilitas BPR terjadi peningkatan dengan perolehan terendah sebesar Rp. 2.983.000.000.000 di bulan Januari dan jumlah tertinggi terdapat pada bulan Oktober dengan perolehan sebesar Rp 3.579.000.000.000. Pada tahun 2018 tingkat kolektibilitas kembali meningkat dengan jumlah terendah diperoleh pada bulan Januari sebesar Rp 3.420.000.000.000, sedangkan jumlah tertinggi terdapat oada bulan Agustus dengan perolehan sebesar Rp 3.916.000.000.000.

**Tabel 4.3**

**Tingkat Kolektibilitas BPRS**

**Periode 2014-2018**

**(Dalam miliar rupiah)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan | Jumlah  (2014) | Jumlah  (2015) | Jumlah  (2016) | Jumlah  (2017) | Jumlah  (2018) |
| Januari | 146 | 184 | 250 | 373 | 486 |
| Februari | 144 | 188 | 260 | 384 | 504 |
| Maret | 153 | 200 | 275 | 402 | 511 |
| April | 156 | 214 | 290 | 404 | 527 |
| Mei | 162 | 223 | 302 | 432 | 544 |
| Juni | 162 | 224 | 290 | 435 | 551 |
| Juli | 171 | 235 | 300 | 439 | 583 |
| Agustus | 177 | 243 | 358 | 444 | 587 |
| September | 189 | 249 | 560 | 451 |  |
| Oktober | 193 | 264 | 568 | 455 |  |
| November | 195 | 260 | 392 | 471 |  |
| Desember | 177 | 243 | 565 | 470 |  |

Sumber: Laporan bulanan statistik perbankan indonesia OJK, diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat kolektibilitas golongan macet BPRS Tahun 2014-2018 meningkat di setiap bulan dan tahunnya. Pada tahun 2014 diketahui bahwa tingkat kolektibilitas BPRS terendah terdapat pada bulan Januari dengan jumlah sebesar Rp 144.000.000.000, sedangkan tingkat kolektibilitas tertinggi sebesar Rp 195.000.000.000 yang terdapat pada bulan November. Pada tahun 2015 tingkat kolektibilitas BPRS terjadi peningkatan dengan perolehan jumlah terendah sebesar Rp 184.000.000.000 di bulan Januari dan jumlah tertinggi terdapat pada bulan Oktober dengan perolehan sebesar Rp.264. 000.000.000. Pada tahun 2016 tingka kolektibilitas BPRS kembali meningkat dengan jumlah terendah diperoleh pada bulan Januari sebesar Rp 250.000.000.000, sedangkan jumlah tertinggi diperoleh pada bulan November sebesar Rp 392.000.000.000. Pada tahun 2017 tingkat kolektibilitas BPRS kembali meningkat dengan perolehan terendah sebesar Rp 373.000.000.000 dan jumlah terbesar pada bulan November dengan perolehan sebesar Rp 471.000.000.000. Pada tahun 2018 tingkat kolektibilitas BPRS kembali meningkat dengan perolehan terendah pada bulan Januari sebesar Rp 486.000.000.000 dan jumlah terbesar terdapat pada bulan Agustus dengan perolehan sebesar Rp 587.000.000.000.

1. **Analisis Deskriptif Statistik**

**Tabel 4.4**

**Deskriptif Statistik**

| **Descriptive Statistics** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| BPR | 56 | 1483 | 3916 | 2635.04 | 726.651 |
| BPRS | 56 | 144 | 587 | 321.70 | 131.832 |
| Valid N (listwise) | 56 |  |  |  |  |

Sumber : data olahan spss 16.0

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa data tingkat kolektabilitas BPR dengan jumlah sampel 56 diperoleh nilai terendah sebesar 1483, nilai tertinggi sebesar 3916, nilai rata-rata sebesar 2635,04 dan nilai standar deviasi sebesar 726,651. Sedangkan pada data tingkat kolektabilitas BPRS dengan jumlah sampel 56 pula menghasilkan nilai terendah sebesar 144, nilai tertinggi sebesar 587, nilai rata-rata sebesar 321,70 dan nilai standar deviasi sebesar 131,832.

1. **Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov**

Output SPSS 16.00 uji normalitas sebagai berikut :

**Tabel 4.5**

**Uji Kolmogorov Smirnov**

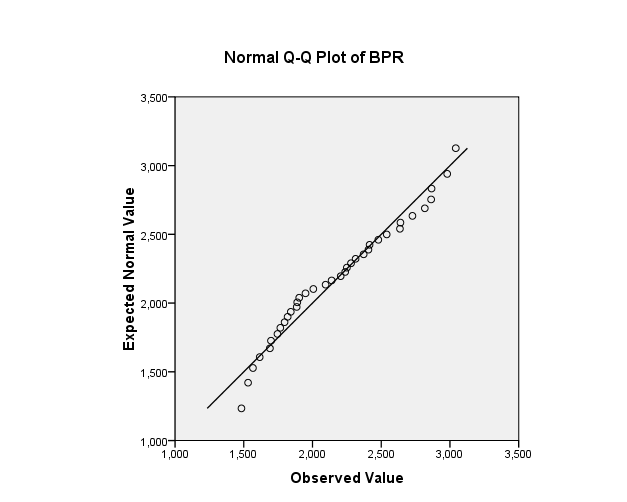
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | BPR | BPRS |
| N | | 56 | 56 |
| Normal Parametersa | Mean | 2635.04 | 321.70 |
| Std. Deviation | 726.651 | 131.832 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .102 | .133 |
| Positive | .095 | .133 |
| Negative | -.102 | -.089 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .765 | .999 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .602 | .271 |
| a. Test distribution is Normal. | |  |  |
|  |  |  |  |

Sumber: Data olahan spss 16.0

Hasil dari pengolahan data variabel BPR dan BPRS pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil kolmogrov-smirnov Z BPR menunjukan nilai 0,765 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,602 > 0,05. Sedangkan pada kolmogrov-smirnov Z BPRS menunjukan nilai 0.999 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,271> 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal atau dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 4.1**

**Q-Q Plot BPR**

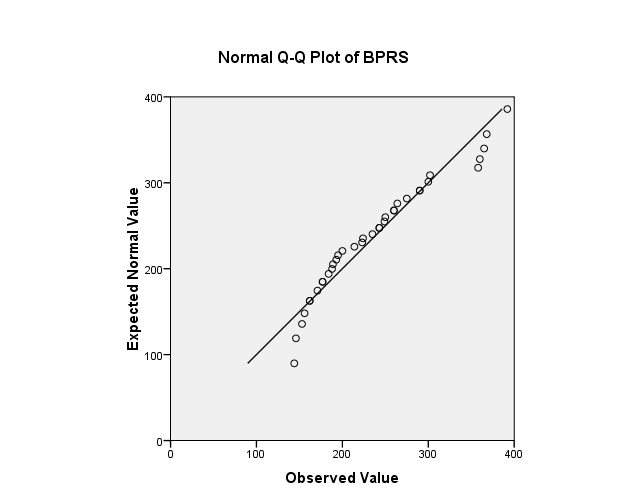


Sumber: Data olahan spss 16.0

Berdasarkan grafik normalitas Q-Q plots diatas memperlihatkan persebaran titik-titik berada berdekatan dengan garis lurus. Hal ini menunjukan bahwa data tingkat kolektabilitas BPR berdistribusi normal.

**Gambar 4.2**

**Q-Q Plot BPRS**



Sumber: Data olahan spss 16.0

Berdasarkan grafik normalitas Q-Q plots diatas memperlihatkan persebaran titik-titik berada berdekatan dengan garis lurus. Hal ini menunjukan bahwa data tingkat kolektabilitas BPRS berdistribusi normal.

1. **Uji *Independent Sample t Test***

Output SPSS 16.00 *Independent Sampel t Test* sebagai berikut :

**Tabel 4.6**

| **Group Statistics** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kelompok | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean |
| Nilai | BPR | 56 | 2635.04 | 726.651 | 97.103 |
| BPRS | 56 | 321.70 | 131.832 | 17.617 |

Sumber: Data olahan spss 16.0

Pada tabel 4.6 *group statistic* terlihat sebagai berikut:

1. Mean (rata-rata) tingkat kolektibilitas BPR sebesar 2635,04
2. Mean (rata-rata) tingkat kolektibilitas BPRS sebesar 321,70
3. Artinya, rata-rata tingkat kolektibilitas BPRS lebih kecil dari pada tingkat kolektibilitas BPR, Hal ini menunjukan adanya perbedaan rata-rata tingkat kolektibilitas BPR dengan BPRS Dimana tingkat kolektibilitas BPR Sebesar 2635,04 lebih besar dari pada BPRS yaitu sebesar 321,70.

**Tabel 4.7**

| **Independent Samples Test** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | | | | | |
|  |  | F | Sig. | t | Df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
|  |  | Lower | Upper |
| Nilai | Equal variances assumed | 129.949 | .000 | 23.441 | 110 | .000 | 2313.339 | 98.688 | 2117.763 | 2508.916 |
| Equal variances not assumed |  |  | 23.441 | 58.617 | .000 | 2313.339 | 98.688 | 2115.838 | 2510.840 |

Sumber: Data olahan spss 16.0

Pada tabel 4.7 *independent sample t test* diperoleh hasil - thitung (-23,441) < -ttabel (-2,00404) dan Probabilitas signifikan 0,000 < 0,05. maka Ho ditolak. Artinya, bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kolektabilitas BPR dan BPRS

1. **Pengujian Hipotesis**

Hipotesis untuk penelitian ini adalah:

1. Uji *independent sampel t test.*

Ho:Tidak ada perbedaan signifikan antara tingkat kolektabilitas BPR dan BPRS

Ha: Ada perbedaan signifikan antara tingkat kolektabilitas BPR dan BPRS

Pengambilan keputusan pada penelitian ini dapat dilakukan dengan dua

cara, yaitu:

1. Berdasarkan perbandingan antara thitung dan ttabel.

Jika: - thitung < -ttabel, maka Ho ditolak

Dimana nilai-nilainya sebagai berikut:

* + 1. Nilai thitung di peroleh dari tabel *independent sample t test* sebesar: -23,441
    2. Nilai ttabel diperoleh dari tabel distribusi dicari pada α= 0,05/2 = 0,025 (uji dua sisi) dengan drajat kebebasan (df) = 35. Maka ttabel diperoleh sebesar: -2,00404
    3. Dapat diketahui bahwa -thitung < -ttabel atau -23,441 < -2,00404 Maka, Ho ditolak.
    4. Keputusannya:

Ada perbedaan antara tingkat kolektabilitas BPR dan BPRS.

|  |
| --- |
| **Gambar 4.3**  **Daerah Penolakan Ho**  Daerah penolakan Ho  Daerah penolakan Ho  Daerah penerimaan Ho      - 23,441 -2,00404 0 2,00404 |

3. Berdasarkan nilai probabilitas

Jika sig 0,05/2 maka Ho diterima.

Jika sig < 0,05/2 maka Ho ditolak.

Dimana nilai-nilainya sebagai berikut:

1. Dari tabel *independent sample t test* diperoleh nilai probabilitas (sig) = 0,000 dengan nilai taraf signifikan (α) 0,05/2= 0,025.
2. Dapat diketahui bahwa sig < 0,05/2= 0,025 atau 0,000 < 0,025. maka Ho ditolak.
3. Keputusannya: Terdapat perbedaan antara tingkat kolektabilitas BPR dan BPRS.
4. **Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan tingkat kolektibilitas golongan macet antara BPR dan BPRS di Indonesia. Rata-rata yang dihasilkan sebesar pada 2635,04 BPR dan 2635,04 pada BPRS dan tingkat signifikansi sebesar 0,000, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tingkat kolektibilitas diantara keduanya memiliki jarak yang cukup jauh. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiki Humaeroh Tuzzahroh yang menghasilkan jumlah rata-rata tingkat kolektibilitas BPRS sebesar 3002 dan BPR sebesar 44219 pada Analisis Perbandingan Tingkat Kolektibilitas BPRS dan BPR di Indonesia Tahun 2011-2013.

Berkaitan dengan perbedaan tingkat kolektibilitas yang begitu kentara diatas, hal ini dapat beralasan karena secara komposisi aset jumlah aset BPR lebih besar dibandingkan dengan jumlah aset BPRS sebagaimana tercermin dalam Laporan Statistik Perbankan Indonesia yang menunjukan total aset BPR pada tahun 2014 sebesar Rp 89.878 Miliar, tahun 2015 sebesar Rp 101.713 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp 113.501 Miliar, sedangkan total aset BPRS pada tahun 2014 sebesar Rp 6.573 Miliar, tahun 2015 sebesar Rp 7.739 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp 9.158 Miliar.